

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris hal ini dibuktikan dengan sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian bercocok tanam atau bertani. Lahan merupakan salah satu faktor yang menjadi ketahanan penduduk untuk bisa bertani. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa lahan merupakan bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.¹ Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Sedangkan arti pertanian sendiri adalah suatu sistem keruangan merupakan subsistem fisis dan subsistem manusia. Yang termasuk dalam subsistem fisis yaitu komponen-komponen tanah, iklim, hidrologi, topografi, dengan segala proses alaiahnya. Sedangkan subsistem manusia ialah tenaga kerja, kemampuan ekonomi dengan kondisi politik setempat (Sumaatmaja, 1988:166). Keberadaan lahan pertanian memiliki 2 (dua) kategori manfaat, yaitu :²

¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

² Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol.23 No. 1, Juli 2005; 1-18

- a. *Use values* : manfaat ini dihasilkan dari kegiatan eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumberdaya lahan pertanian.
- b. *Non-use values* : manfaat ini adalah manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik lahan. Contohnya adalah terpeliharanya keragaman biologis atau keberadaan spesies tertentu, yang pada saat ini belum diketahui manfaatnya namun mungkin akan sangat berguna dimasa yang akan datang.

Sistem persawahan merupakan sistem yang multifungsi, hal ini dikatakan Pasandaran (2006) :

Fungsi *Pertama* yaitu menopang produksi pangan, lahan, air, praktik bercocok tanam, dan kelembagaan yang terkait merupakan elemen yang diperlukan dalam proses produksi. *Kedua*, fungsi konservasi yaitu pemeliharaan elemen-elemen biofisik yang ada, seperti jaringan irigasi dan persawahan. Apabila elemen-elemen tersebut terpelihara maka fungsi konservasi dapat berangsur dengan baik. *Ketiga*, pewarisan nilai-nilai budaya fungsi ini adalah kapital sosial dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Pengelolaan konflik dalam rangka pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu elemen dari nilai-nilai budaya.

Namun, eksistensi sistem persawahan menghadapi berbagai ancaman sejalan dengan makin rusaknya sumber daya alam akibat pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat bertambah jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media

bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan yang kian waktu kian meningkat.³

Konversi atau alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-nonpertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri.⁴

Konversi lahan untuk berbagai keperluan banyak terjadi di daerah pedesaan yang padat penduduk seperti di Jawa. Pasandaran (2006) kembali mengatakan determinan konversi lahan, yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 1.1 Luas Lahan Sawah Berdasarkan Provinsi Di Pulau Jawa

Provinsi	2012	2013	Perubahan
Jawa Timur	1,152,847.71	1,102,863.00	-50,011.71
Jawa Tengah	1,101,851.06	952,525.00	-149,326.06
DIY	71,868.41	55,336.00	-16,532.41
Jawa Barat	925,565.19	925,042.00	-523.19
DKI	1,103.17	895.00	-208.17
Banten	191,020.00	194,716.00	+3,696.00

Sumber : www.pertanian.go.id yang sudah diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya perubahan angka lahan

³ Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat , Muh. Iqbal dan Sumaryanto.

⁴ I Made Muhaidi Dwipradnyana, 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani(study kasus si subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)*. Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar.

luas sawah. Banyak provinsi di pulau Jawa yang mengalami penurunan luas tanah sawah terkhususnya di Jawa Tengah yang mengalami penurunan luas lahan sawah terbanyak. Ini tentunya menjadi sebuah problematika yang harus digagas oleh Pemerintah.

Tabel 1.2 Luas Lahan Sawah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2015

No	Kabupaten/Kota	2014 (ha)	2015 (ha)	Penyusutan (ha)
1.	Sukoharjo	20.508	18.758	1.750
2.	Pekalongan	23.606	22.236	1.370
3.	Batang	21.118	20.353,765	765
4.	Rembang	27.642	26.913,2	728,8
5.	Wonosobo	15.730	15.096	634
6.	Sragen	39.907	39.363	544
7.	Jepara	24.572	24.163	409
8.	Tegal	37.212	36.880	332
9.	Purbalingga	20.622	20.322	300
10.	Purworejo	29.970	29.723	247

Sumber : www.pertanian.go.id yang sudah diolah

Sedangkan pada tabel 1.2 menunjukkan penyusutan lahan ditingkat kabupaten/kota yang terbanyak ada di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1.750ha hanya dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Padahal dalam Perda Kabupaten Sukoharjo No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sukoharjo menetapkan bahwa Sukoharjo kawasan yang diperuntukkan pertanian. Banyaknya penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan banyaknya pendirian pabrik-pabrik atau berubahnya lahan pertanian menjadi daerah industri. Kecamatan Nguter merupakan daerah terjadinya banyak perubahan lahan pertanian menjadi indutri, bahkan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menggagas pembangunan terminal peti kemas di wilayah Nguter, rencananya terminal ini akan mendistribuksikan hasil produksi maupun memasok bahan baku ke perusahaan-perusahaan yang ada di

Kecamatan Nguter dengan menggunakan jalur keta api. Terminal peti kemas nantinya juga terkoneksi langsung dengan pelabuhan Tanjung Emas Semarang maupun Tanjung Perak Surabaya.⁵ Dengan adanya banyak industri memang mempunyai peranan dan fungsi yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur industri berkeunggulan komparatif dan kompetitif serta meningkatkan produktivitas, efisien dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.⁶

Namun perlu diperhatikan bahwa sisi positif dari adanya pembangunan industri tak selalu dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Lahan yang digunakan untuk pembangunan industri merupakan tanah persawahan milik warga yang dijual kepada instansi tertentu dengan iming-iming harga yang tinggi. Ketika petani telah menjual lahan pertaniannya maka petani tak lagi memiliki mata pencaharian yaitu bertani. Ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, menjadikan hukum sebagai alat mencapai keadilan. Penggunaan tanah bersama dengan pengaturan dan dibawah pimpinan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam artian masyarakat Indonesia bukan hanya golongan tertentu saja maka dalam pemenuhan

⁵Elshinta.com. Senin, 12 Juni 2017 “*Kawasan Industri Nguter, ladang investasi di lahan tandus Sukoharjo*”, dikses pada 9 Maret 2018 pukul 21.05 WIB.

⁶ Zulaika Tipe Nurhidayah.2017. “*Aspek Keadilan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian*”. Volume IV (hal.157). Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.

kemakmuran tidak boleh sampai merugikan kepentingan bersama hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja.⁷

Dengan melihat fenomena yang terpapar dilatar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul “

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perindustrian Terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri terhadap lapangan kerja setelah menjadi daerah industri?
2. Bagaimanakah dampak dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri terhadap buruh tani?
3. Bagaimanakah kebijakan yang ideal dalam menghadapi konversi lahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian, antara lain:

1. Mengetahui apakah dengan adanya kebijakan perubahan lahan pertanian menjadi perindustrian memberikan pengaruh terhadap masyarakat Nguter?
2. Mengetahui dampak dari adanya konversi lahan pertanian menjadi industri terhadap keberadaan petani.

⁷Ibid.

3. Mengetahui konsep kebijakan yang ideal dalam menghadapi konversi lahan.

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan tentang dampak dari adanya konversi lahan pertanian menjadi perindustrian, karena adanya industri besar tidak selalu memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perindustrian. Sehingga diharapkan perlu selektif untuk memberikan izin konversi pada kawasan kuning.

2. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan konservasi tanah atau lahan hendaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah dan Pemda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konversi tanah dan air yang meliputi:⁸

1. Perlindungan sumber daya lahan dan air.
2. Pelestarian sumber daya lahan dan air.
3. Pengelolaan kualitas lahan dan air.
4. Pengendalian pencemaran.

Dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2009 menetapkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilindungi dan tidak boleh dialih fungsikan. Perda Kabupaten Sukoharjo No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

⁸ Pasal 33 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Wilayah kabupaten Sukoharjo menetapkan bahwa Sukoharjo kawasan yang diperuntukkan pertanian.

3. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji peraturan dan membandingkan dengan keadaan nyata atau yang sesungguhnya serta melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah dimana akan dilakukan penelitian untuk membantu peneliti melakukan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak dari konversi lahan terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

3. Bentuk Jenis Data

Penelitian ini menggunakan

- a. Data primer yang akan diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian langsung ke lapangan sehingga peneliti akan menemukan fakta yang ada dan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yaitu masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang no.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 4) Perda Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik mengumpulkan data dilakukan dengan sebuah wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Nguter khususnya petani untuk menambah informasi atau fakta yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan dekritif-analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan keadaan nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

4. Sistematika Laporan

Adapun format atau sistematika laporan penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang berisi :

- A. Tentang latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian

- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka pemikiran
- F. Metode penelitian dan
- G. Sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup :

- A. Tinjauan umum tentang lahan atau tanah
- B. Tinjauan umum lapangan pekerjaan
- C. Tinjauan umum tentang petani.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak konversi lahan terhadap ketersediaan lapangan kerja penduduk asli Nguter.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.